



UNIVERSITAS IPWIJA

SK Kemendikbudristek RI No. 627/E/O/2022

Jl. H. Baping No.17 Kel. Susukan, Kec. Ciracas

Jakarta Timur. 13750 Telp. 021-22819921

E-mail : contact@ipwija.ac.id <https://ipwija.ac.id>

 UNIVERSITAS IPWIJA

No. : 077/IPWIJA.LP2M/PkM-00/2024
Perihal : Narasumber, Pendamping dan Pemberi Materi
Lampiran : -

Kepada Yth.

H. Harsin, ABD. Rahim, S.Pd., M.Si

Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kab Konawe
Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat dari Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan - Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang No.900.1.15.1/011/DPUTR/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024, yaitu akan diadakannya kegiatan, dan perihal tersebut di atas dengan ini Kepala LP2M Universitas IPWIJA menugaskan:

Dr. Taufik, S.E., M.M. (NIDN: 0310037303)

Untuk menjadi Narasumber dalam kegiatan yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Senin – Kamis, 1 s/d 4 Juli 2024
Waktu : 08.00 s/d 15.00 WIB
Tempat : Hotel Cordela Senen – Jakarta
Tema : “Dampak Pelaporan Keuangan SKPD/OPD Dalam Akselerasi Sinergi Pembangunan Daerah.”

Setelah pelaksanaan kegiatan Dosen yang ditugaskan diwajibkan membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan kepada pemberi tugas (LP2M Universitas IPWIJA). Mohon bantuan penanggungjawab kegiatan membantu menyediakan berkas yang diperlukan untuk pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan.

Demikian Surat Tugas ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 4 Juni 2024



Dr. Ir. Titing Widyastuti, M.M.
Kepala LP2M Universitas IPWIJA



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
DINAS PEKERJAAN UMUM & TATA RUANG

Alamat : Jl. Kompleks Perkantoran Km 3 Langara

Langgara, 03 Juni 2024

Nomor : 900.1.15.1/011/DPUTR/VI/2024
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Permintaan
Narasumber

Kepada
Yth. Kepala LP2M
Universitas IPWI Jakarta
di -
Jakarta

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan kegiatan “Bimbingan Teknis Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD/OPD Berdasarkan PP12/2019 dan Permendagri 77/2020” yang akan diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan LPMN bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Konawe Kepulauan, dengan ini kami mohon untuk menugaskan narasumber pada kegiatan dimaksud yang direncanakan pada :

Hari/tanggal : Senin – Kamis, 1 s/d 4 Juli 2024
Pukul : Disesuaikan dengan jadwal
Materi : Dampak Pelaporan Keuangan SKPD/OPD dalam Akselerasi Sinergi Pembangunan Daerah
Lokasi : Hotel Cordela Senen – Jakarta

Narasumber yang diminta untuk mengisi kegiatan dimaksud sebanyak 1 orang jabatan fungsional .

Demikian permohonan ini kami sampaikan , atas bantuannya kami sampaikan terima kasih

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas
H.HARSIN ABD. RAHIM, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
DINAS PEKERJAAN UMUM & TATA RUANG

Alamat : Jl. Kompleks Perkantoran Km 3 Langara

Langgara, 05 Juli 2024

Nomor : 400.14.12/032/DPUTR/VII/2024
Sifat : -
Lampiran : -
Periha : Ucapan Terima Kasih

Kepada
Yth. Kepala LP2M
Universitas IPWI Jakarta
di -
Jakarta

Dengan hormat

Salam sejahtera kami sampaikan kepada bapak/ibu pimpinan, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Sebagaimana kegiatan yang sudah kami agendakan dan dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Kamis, tanggal 1 s/d 4 Juli 2024, bertempat di Hotel Cordela Senen Jakarta, dalam rangka "Bimbingan Teknis Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD/OPD Berdasarkan PP12/2019 dan Permendagri 77/2020" bagi staf Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang kabupaten Konawe Kepulauan, dengan hasil yang sebagaimana diharapkan oleh kami, atas nama Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kab Konawe Kepulauan mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Dosen/Staf Pengajar dari Universitas IPWI Jakarta (**Bapak Dr. Taufik, SE,MM NIDN. 0310037303**), yang telah memberikan materi terkait Dampak Pelaporan Keuangan SKPD/OPD dalam Akselerasi Sinergi Pembangunan Daerah, sehingga membantu meningkatkan motivasi proses penyusunan Laporan Keuangan di OPD kami.

Besar harapan kami, semoga melalui kegiatan ini dapat terjalin kerjasama antara Universitas IPWI Jakarta dengan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, pada kegiatan-kegiatan yang lain.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas
H.HARSIN ABD. RAHIM, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dampak Pelaporan Keuangan SKPD/OPD dalam Akselerasi Sinergi Pembangunan Daerah

Dr. Taufik, SE,MM

*Disampaikan pada Bimtek Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD/OPD
Berdasarkan PP12/2019 dan Permendagri 77/2020
Hotel Cordela Senen Jakarta, 1 Juli 2024

Pengantar

- ▶ Kemendagri R.I telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang **Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah** yang ditetapkan dan diundangkan pada 30 Desember 2020.
- ▶ Dengan berlakunya Permendagri tersebut maka permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya, Permendagri Nomor 55 Tahun 2008, dan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dan perubahannya, **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**. Permendagri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PPK-SKPD

- ▶ Dalam Permendagri 77/2020, salah satu Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD).

PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang:

- melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- menyiapkan SPM;
- melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
- menyusun laporan keuangan SKPD.

PPK-SKPD

Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana tersebut di atas, PPK SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu:

- melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;
- melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan; dan
- menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.

Laporan Keuangan yang handal dan tepat waktu

- ▶ Untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dari Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat.
- ▶ Dengan akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil akhir atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara/daerah.
- ▶ Salah satu media untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan menyajikan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu serta dipublikasikan kepada masyarakat.

Tujuan Laporan Keuangan

- ▶ Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
- ▶ Secara spesifik tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Unsur laporan keuangan pemerintah berbasis akrual terdiri dari:

1. Laporan Pelaksanaan Anggaran, yang terdiri dari :
 - Laporan Realisasi Anggaran dan
 - Laporan Perubahan SAL;
2. Laporan Finansial, yang terdiri dari:
 - Neraca,
 - Laporan Operasional,
 - Laporan Perubahan Ekuitas dan
 - Laporan Arus Kas
3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Maksud penyusunan laporan keuangan OPD

Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan serta memudahkan pengguna untuk memahami dan sekaligus dapat dipahami oleh pembaca secara luas,

Tujuan pelaporan keuangan OPD

menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Keuangan Daerah

- ▶ **Keuangan daerah adalah tulang punggung pembangunan berkelanjutan suatu wilayah.**
- ▶ **Keberlanjutan keuangan daerah bukan hanya tentang mengelola uang dengan bijak, tetapi juga tentang memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki sumber daya yang cukup untuk memberikan layanan esensial kepada masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi.**
- ▶ **Keuangan yang berkelanjutan menciptakan stabilitas dan memungkinkan inovasi yang diperlukan untuk masa depan yang lebih baik.**

Keuangan daerah

- ▶ Keuangan daerah adalah lanskap yang kompleks sebagai elemen pokok dalam sistem ekonomi suatu negara. Keuangan daerah mencakup pengelolaan pendapatan, pengeluaran, dan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, yang bertanggung jawab memberikan layanan publik kepada warganya.
- ▶ Pemerintah daerah memiliki berbagai sumber pendapatan, termasuk pajak, retribusi, dan transfer dari pemerintah pusat. Di sisi lain, mereka harus mengelola pengeluaran untuk infrastruktur, layanan publik, dan administrasi. Kompleksitas ini meningkat seiring fluktuasi ekonomi, perubahan kebijakan, dan beragamnya kebutuhan masyarakat.

Sumber Pendapatan dan Alokasi Pengeluaran

- ▶ Pemerintah daerah memiliki berbagai sumber pendapatan, termasuk pajak, retribusi, dan transfer dari pemerintah pusat.
- ▶ Di sisi lain, mereka harus mengelola pengeluaran untuk infrastruktur, layanan publik, dan administrasi.
- ▶ Kompleksitas ini meningkat seiring fluktuasi ekonomi, perubahan kebijakan, dan beragamnya kebutuhan masyarakat.

Tantangan mewujudkan keuangan daerah yang berkelanjutan

- ▶ Hutang yang meningkat seiring berjalannya waktu.
- ▶ Pendapatan yang terbatas,
- ▶ risiko ekonomi,
- ▶ perubahan kebijakan pusat, dan
- ▶ kebutuhan untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur.

Mengelola semua aspek ini dengan bijaksana adalah tugas yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang keuangan daerah.

Pentingnya Keberlanjutan Keuangan Daerah

- ▶ Keberlanjutan keuangan daerah adalah elemen kunci dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini karena keuangan daerah yang sehat memungkinkan pemerintah daerah memberikan layanan publik berkualitas misalnya dalam bentuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

Pentingnya Keberlanjutan Keuangan Daerah

Pemerintah daerah menjadi mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui:

- ▶ investasi dalam proyek pembangunan,
- ▶ penciptaan lapangan kerja, dan
- ▶ peningkatan pendapatan masyarakat.
- ▶ meningkatkan kemandirian dengan mengurangi ketergantungan pada sumber dana eksternal, yang memberikan stabilitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Keberlanjutan keuangan daerah juga
- ▶ mencegah risiko kebangkrutan atau kesulitan keuangan serius, yang penting untuk menjaga kontinuitas pemerintahan dan pelayanan publik.

Komponen Laporan Keuangan OPD meliputi

- ▶ Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
- ▶ Laporan Operasional
- ▶ Laporan Perubahan Ekuitas
- ▶ Neraca,
- ▶ Laporan Arus Kas (LAK), dan
- ▶ Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Dampak Pelaporan Keuangan SKPD/OPD

- ▶ Bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu dalam:
- ▶ Mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan
- ▶ Menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu.
- ▶ Memprediksi rencana keuangan masa depan

Manfaat Informasi Keuangan

- ▶ Informasi Keuangan akan bermanfaat apabila dapat dipahami oleh pengguna.
- ▶ Untuk itu informasi keuangan harus dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna dan disisi lain, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai untuk memahami informasi keuangan yang disajikan.

Efektivitas Pelaporan Keuangan

- ▶ Efektivitas Pelaporan Keuangan dalam mendukung pengambilan keputusan sangat tergantung pada kualitas informasi (karakteristik kualitatif) yang disajikannya.
- ▶ Karakteristik kualitatif informasi tersebut meliputi karakteristik relevan, andal, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami.
- Karakteristik relevan terpenuhi apabila informasi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna;
- Karakteristik keandalan informasi apabila Informasi keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi;
- Informasi akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode, baik secara internal maupun eksternal.